

# **TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**NURLINDA SUDIRMAN**

Program Studi D3 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Makassar  
Jl.Raya Pendidikan Makassar  
Email:  
[nurlindasudirman30@gmail.com](mailto:nurlindasudirman30@gmail.com)

## **SUMMARY**

This study aims: to determine the process of preparing the Expenditure Budget at the Department of Culture and Tourism of South Sulawesi Province. The variables of this research are: Preparation of the Expenditure Budget by Comparing the Preparation of the Cultural and Tourism Office of the Province of South Sulawesi with the preparation of the Expenditure Budget Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs No or 38 of 2018 concerning Guidelines for Preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget for the 2019 Fiscal Year. The population of this study is: the overall data for the preparation of the budget, while the sample is the data for the preparation of the budget for the budget year. 2019. Data collection is carried out using interviews and documentation. Data analysis was carried out using descriptive analysis. The results of this study indicate that the Department of Culture and Tourism of South Sulawesi Province in the process of preparing the budget for the 2019 fiscal year is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 38 of 2018 concerning Guidelines for the Preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget for the 2019 Fiscal Year.

**Keywords :** *Budget Preparation*

## **RINGKASAN**

Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui Proses Penyusunan Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel penelitian ini adalah: Penyusunan Anggaran Belanja dengan membandingkan penyusunan anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dengan penyusunan anggaran belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No or 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Populasi penelitian ini adalah: keseluruhan data penyusunan anggaran belanja , sedangkan sampel adalah data penyusunan anggaran belanja tahun anggaran 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses penyusunan anggaran belanja tahun anggaran 2019 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

**Kata kunci :** Penyusunan Anggaran Belanja

## **PENDAHULUAN**

Anggaran disusun secara sistematis dalam bentuk rencana keuangan yang berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi. Masyarakat menuntut penyusunan anggaran setiap organisasi pemerintah agar transparansi dan akuntabilitas publik. Sehingga, organisasi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya diharapkan terlaksana dengan baik dan bertanggung jawab.

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata membantu Gubernur dalam pelaksanaan wewenang desentralisasi dan membantu tugas Gubernur memajukan Sulawesi selatan dibidang budaya dan pariwisata. Dana untuk membiayai kegiatan operasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Belanja Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

menyatakan belanja daerah digunakan untuk membiayai segala kegiatan pemerintah yang merupakan wewenang daerah seperti kegiatan pemerintah yang wajib maupun kegiatan pemerintah pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada penyusunan anggaran sering kali terjadi suatu kegiatan yang seharusnya diselenggarakan namun dananya tidak tersedia ataupun tidak cukup, Semisalnya dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kantor atau dinas tertentu yang sangat diperlukan agar kegiatan berjalan dengan lancar dan kinerja para pegawai juga tetap baik. Permasalahan yang juga menghambat proses penyusunan anggaran yakni munculnya peraturan-peraturan baru yang dijadikan acuan baru dalam proses penyusunan anggaran tersebut.

Anggaran belanja merupakan bagian penting dalam kegiatan operasional dinas atau lembaga daerah, hal ini terkait dengan pembiayaan kegiatan yang ada pada dinas atau lembaga daerah. Oleh karena itu penyusunan anggaran belanja harus berjalan efektif dan efisien dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaannya dan dapat menjelaskan biaya-biaya yang dibebankan kepada masing-masing kegiatan yang dilakukan oleh dinas atau lembaga daerah tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

Variabel dalam penelitian ini adalah Penyusunan Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu pengumpulan data tertulis berupa dokumen yang

mendukung penelitian dan wawancara yang dalam hal ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Penulis memperoleh informasi langsung dengan teknik wawancara dari narasumber bapak Ichsan Satriadi TN,SE selaku Kasubag Program pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif karena adanya variabel yang akan ditelaah hubungannya dan tujuannya untuk menyajikan gambaran yang terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dibandingkan antara teori yang telah dipelajari dengan data yang diperoleh dari penelitian.

Kemudian dilakukan pengolahan data untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian , yaitu :

#### **1. Pengumpulan Data**

Pertama dilakukan pengumpulan data berupa dokumen-dokumen terkait dalam penyusunan anggaran dan jawaban dari sesi wawancara berdasarkan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

#### **2. Penarikan Kesimpulan**

Merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh dan kesimpulan. juga diverifikasi selama penelitian berlangsung Kesimpulan ditarik semenjak peneliti

menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diperoleh data dan informasi sebagai bahan dalam penelitian. Dalam pembahasan ini penulis akan menganalisis data dengan cara membandingkan penyusunan anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dengan Penyusunan anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 seperti yang telah dipaparkan pada bagian dasar hukum penganggaran.

Penetapan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan haruslah berdasar pada visi dan misi gubernur dan wakil gubernur dengan menetapkan kegiatan yang berskala prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya dijadikan pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bagi pemerintah daerah sedangkan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA). Dengan berdasar pada Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) disahkan menjadi APBD , maka disusun rincian APBD dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun proses penyusunan Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 Juli 2018 rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
2. Selanjutnya Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 903/7316/BPKD tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/SKPKD APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 yang disiapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan diterima oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 8 Agustus 2018.
3. Mulai tanggal 9 Agustus 2018 pihak Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata menyusun RKA-SKPD dengan cara mengimput RKA-SKPD kedalam sistem atau aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) dimana rancangan tersebut diperoleh dari gabungan rancangan kegiatan dan program serta anggaran dari bidang-bidang yang ada di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang telah diinput kemudian diprint lalu ditanda tangani oleh Kepala Dinas yang selanjutnya diserahkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yakni

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA), Inspektorat, Biro Aset, Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk diasistensi.

5. Apabila saat proses asistensi terdapat ketidaksesuaian atau kesalahan maka akan dilakukan perbaikan dengan cara pengimputan kembali ke Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) kemudian diserahkan kembali ke pihak yang bersangkutan dalam hal ini TAPD yang melakukan koreksi terhadap RKA-SKPD. Proses asistensi RKA-SKPD pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan berlangsung selama 14 hari atau 2 minggu yakni sekitar tanggal 21 Agustus 2018 – 5 September 2018.
6. kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) .
7. Tanggal 1 Oktober 2018 penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas.
8. Awal bulan november sekitar tanggal 5 November 2018 disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah. Kemudian hasil rancangan yang telah disetujui diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

9. Hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri diterima oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian diserahkan ke SKPD terkait dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan perbaikan oleh Sub Bagian Program.
10. Setelah hasil perbaikan disetujui, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat berisi nomor register yang menyatakan bahwa persentase dalam setiap anggaran sudah sesuai dan diserahkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
11. Kemudian dilakukan penyempurnaan dari Rancangan sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
12. Tanggal 28 Desember 2018 ditetapkan Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2019 terjadi revisi dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan adanya perubahan jadwal atau karena hal lainnya. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan kemudian mengajukan usulan revisi dengan melampirkan kode rekening kegiatan dan belanja beserta alasan diajukannya revisi. Sehingga pelaksanaan kegiatan untuk Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 setelah dilakukan revisi dan perubahan tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1772/X/Tahun 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 yang disahkan tanggal 1 Oktober 2019.



## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan mengenai penyusunan anggaran belanja maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan(Pokok) Tahun Anggaran 2019 dimulai pada bulan juli dan berakhir pada bulan desember tahun sebelumnya dengan menggunakan pendekatan bottom-up.Klasifikasi Belanja daerah pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan terbagi dua yaitu belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai dan belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Pihak yang terlibat dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 yakni Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meliputi BAPPEDA , Inspektorat , Biro Aset , Biro Pengadaan Barang dan Jasa. OPD terkait dalam hal ini bidang-bidang dan seksi dalam Dinas serta Mitra Dinas dalam pelaksanaan program atau kegiatannya.Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan masih dapat terjadi perubahan jika alasan yang diajukan sesuai dan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

## **SARAN**

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam penyusunan anggaran pada

tahun-tahun berikut agar lebih efisien dan efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak yang terkait dalam penyusunan anggaran agar penganggaran belanja dan pelaksanaan kegiatan atau program berjalan dengan baik dan meminimalisir perubahan serta realisasi anggaran dapat maksimal kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Elsye, R., Suwanda, D., & Muchidin, U. (2016). *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah..* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Halim, A. & Kusufi, S. M. (2018). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Public Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah.* Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, D. & Hertianti, A. (2011). *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.
- Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah.* Jakarta: Prenadamedia Group .
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolahan Keuangan Daerah*
- Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan 2019 - 2023 .
- Sejarah Gedung Mulo , Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual).* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Suryabrata, S. (2016). *Metodologi Penelitian.* (Cetakan ke-27). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wikipedia(2016). *Anggaran Belanja* Dikutip 22 Mei 2021 dari Wikipedia.org:  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anggaran\\_belanja](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anggaran_belanja).